

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD '45 juga memperjelas kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Pasal 28B (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 31 UUD '45 lebih tegas menyatakan tentang hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan ayat (1), menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah harus memberikan akses pendidikan pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri menterjemahkan amanah ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas menyebutkan keinginan besar pemerintah dalam bidang pendidikan yang mengamanatkan agar dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD. Dengan dana APBN sebesar itu pemerintah bercita-cita untuk menyelenggarakan

pendidikan dasar gratis tanpa terkecuali. Di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan, berbagai kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah pada sektor pendidikan. Kebijakan yang dibuat bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mutu pendidikan nasional dapat meningkat.

Peraturan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti yang terjabarkan dalam visi pendidikan nasional Indonesia yakni terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Guna mendukung terwujudnya visi tersebut, maka pendidikan nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki misi yang harus dilaksanakan yaitu: (1) menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar; (2) mewujudkan sistem pendidikan efektif, efisien, dan bertanggung jawab; (3) mewujudkan pendidikan nasional yang merata dan bermutu. Kondisi tersebut melatarbelakangi pemerintah mengambil suatu kebijakan dalam bidang pendidikan yaitu program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA) sederajat dengan penduduk kelompok usia sekolah. Namun ternyata pada implementasinya tidak sesuai dengan apa yang telah disahkan dalam UU yang bersangkutan.

Kebijakan pemerintah pada program BOS yang telah dilaksanakan

ternyata hanya mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan. Dalam kenyataannya, masih banyak siswa miskin yang tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya karena harus mengeluarkan biaya individu seperti biaya transportasi, seragam, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat dipenuhi dari dana BOS.

Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat keluarga miskin mengabaikan kebutuhan akan pendidikan. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, Presiden telah membuat kebijakan pengganti kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) didalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Inpres No 7 Tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar Nomor 12 Tahun 2015. Program Indonesia Pintar yang PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang

orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Program Indonesia Pintar (PIP). Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.

Perbedaan antara BOS dan PIP yaitu BOS merupakan biaya untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu agar memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Sedangkan PIP adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bahkan hingga tingkat menengah atas, serta membantu kelancaran program sekolah.

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi. Dana PIP tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan langsung maupun tidak langsung personal para siswa. Kebutuhan langsung seperti membeli buku sekolah, seragam, dan alat tulis, sedangkan kebutuhan tidak langsung seperti uang saku, biaya transportasi, kursus, dan lain- lain.

Program Indonesia Pintar telah mencakup seluruh kabupaten-kabupaten di Indonesia termasuk Kota Semarang. Kota Semarang adalah Ibu kota provinsi Jawa Tengah yang menjadi sentral pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi dan terdapat banyak sekali keluarga pra sejahtera (miskin). Banyaknya keluarga miskin di kota Semarang sangat berpengaruh terhadap berapa keluarga yang berhak mendapatkan dana PIP. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Bappeda kota Semarang besar keluarga miskin sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015

No	Kecamatan	Rawan Miskin	Miskin	Sangat miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Semarang Barat	39.265	4.372	-
2	Semarang Utara	34.667	8.223	17
3	Tembalang	29.499	4.395	7
4	Genuk	21.170	3.367	4
5	Ngaliyan	18.803	2.027	4
6	Semarang Timur	18.487	3.092	8
7	Gunung Pati	17.251	2.621	-
8	Candisari	20.369	4.061	-
9	Gayamsari	19.826	2.376	-
10	Pedurungan	23.531	2.164	-
11	Semarang Selatan	23.531	2.861	-
12	Banyumanik	12.834	2.245	
13	Mijen	10.836	3.932	15
14	Semarang Tengah	12.039	5.576	48
15	Gajah Mungkur	14.196	1.365	-
16	Tugu	9.527	1.401	5
Jumlah		Jumlah Jiwa: 373.978		

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk miskin tertinggi berada

di Kecamatan Semarang Barat sebesar 43.637 jiwa, diikuti Semarang Utara sebesar 42.907 jiwa, dan Tembalang sebesar 33.901 jiwa. Berdasarkan data keluarga miskin tersebut penulis mengambil lokasi yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni Kecamatan Tembalang. Kecamatan Tembalang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah keluarga miskin terbesar ketiga setelah kecamatan Semarang Barat dan Utara.

Rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok masyarakat miskin adalah karena tingginya biaya pendidikan. Penyebab lainnya dari anak tidak bersekolah antara lain adalah kurangnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anak, kondisi ekonomi orangtua yang serba kekurangan atau dapat dikatakan miskin, penyebab lain yaitu keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Adapun untuk wilayah Kota Semarang masih banyak keluarga/ masyarakat miskin yang tidak dapat menjangkau akses pendidikan sehingga membuat anak mereka tidak bersekolah, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Anak Tidak Bersekolah Menurut Kecamatan dan Kelompok Usia Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah Kota Semarang

Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah			
		Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 16-18 tahun	Total
Semarang Utara	120	100	198	670	968
Tembalang	070	109	175	593	877
Semarang Barat	140	100	109	478	687
Genuk	090	60	98	505	663
Semarang Timur	110	86	130	436	652
Pedurungan	080	91	109	448	648
Gayamsari	100	86	130	436	604
Mijen	010	92	80	362	534
Gunungpati	020	33	87	366	486
Banyumanik	030	54	67	355	476
Semarang Tengah	130	30	63	270	363
Candisari	060	39	63	258	360
Ngaliyan	160	43	53	257	353
Semarang Selatan	050	30	39	207	267
Tugu	150	16	26	90	132
Gajahmungkur	040	9	19	90	118
		990	1,431	5,776	8,197

Sumber: Basis Data Terpadu 2015

Berdasarkan tabel di atas jumlah anak yang tidak bersekolah secara keseluruhan berjumlah 8197 siswa. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan rentang usia 7-12 tahun masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah. Kecamatan Tembalang sendiri memiliki jumlah anak tidak bersekolah usia 7- 12 tahun sebanyak 109 siswa, semarang utara 100 siswa, dan semarang barat 100 siswa, dan yang terendah adalah gajahmungkur sebesar 9 siswa. Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang tidak bersekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) untuk Kecamatan Tembalang tertinggi dibandingkan beberapa kecamatan lainnya.

Program pemberian dana PIP diharapkan dapat meningkatkan

akses pelayanan bagi keluarga miskin di bidang pendidikan guna menyukseskan pendidikan dasar khususnya di Kecamatan Tembalang. Sejauh ini penggunaan anggaran PIP yang terbatas di Kecamatan Tembalang lebih didistribusikan kepada masyarakat miskin yang memiliki KKS. Padahal sebagian siswa miskin yang tidak memiliki KKS juga sangat membutuhkan dana PIP tersebut, dibandingkan dengan yang memiliki KKS. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah juga memiliki kewenangan yang memadai untuk menentukan usulan prioritas yang menerima dana PIP dengan prinsip pemerataan dan keadilan.

Pelaksanaan Program PIP di Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang dinilai masih terdapat permasalahan pemberian informasi atau koordinasi dari lembaga lain seperti informasi yang disampaikan tidak valid, sehingga untuk menginformasikan, mendata dan merekap data siswa tersebut menjadi sangat lama. Kemudian terdapat permasalahan mengenai prioritas penentuan calon penerima dana PIP yang masih hanya menggunakan KKS saja.

Berdasarkan kenyataan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan program PIP di Kecamatan Tembalang. Dengan begitu perlu dilakukan kajian melalui penelitian, peneliti mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Program PIP Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan teori yang didapat selama perkuliahan khususnya mengenai Implementasi Kebijakan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Kota Semarang terhadap implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar Kecamatan Tembalang, sehingga kekurangan- kekurangan yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan kebijakan PIP dapat segera diatasi.
2. Bagi peneliti. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar Kecamatan Tembalang, sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran yang efektif guna tercipta kualitas pelayanan pendidikan yang lebih baik.

3. Bagi masyarakat. Sebagai informasi dan pendidikan bagi masyarakat tentang program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan topik serta judul yang penulis angkat dalam tulisan ini maka penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sehingga dapat memperkaya teori serta bahan kajian pada tulisan ini. Dari penelitian terdahulu, penulis hingga saat ini belum menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Berikut ini merupakan beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian dengan judul Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa Masalah implementasi Indonesia Program Pintar antara lain tujuan dan sasaran, sosialisasi, data mekanisme pengumpulan dan verifikasi, distribusi dana, komunikasi, sumber daya, karakteristik agen pelaksana dan lingkungan sosial. Itu rekomendasi yang diberikan adalah bahwa lembaga pelaksana harus lebih banyak bertanggung jawab untuk mengoordinasi sekolah menengah pertama dan bank penyalur, menjadi mampu memperhatikan sumber daya manusia yang terlibat dalam Smart Indonesia ini program menjadi lebih memadai tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas, itu agen pelaksana harus dapat bersikap tegas dan ketat

terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk lingkungan sosial, terutama orang tua dari Program Indonesia Pintar penerima manfaat, harus lebih dipahami dan mematuhi ketentuan dan program teknis Indonesia Pintar

Penelitian Yoani Mega Pertiwi dan Aloysius Rengga dengan judul Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar Negeri (SD) Di Jakarta Timur Wilayah II menggunakan teori menurut George Edward III. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pada kenyataannya di lapangan implementasi KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme KJP di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrumen wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus disekolah untuk menangani KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder.

Selanjutnya penelitian yang disusun oleh Sartika, Dian Prima Safitri, Edison dengan judul Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan variabel implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan PIP sehingga belum sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan PIP, diantaranya data yang digunakan dalam penentuan siswa calon penerima KIP masih kurang akurat, waktu pencairan dana PIP yang terlambat, kegiatan sosialisasi yang masih kurang optimal dilakukan, lamanya waktu verifikasi kepemilikan KIP, serta masih rendahnya kesadaran wali murid tentang peruntukkan bantuan PIP

Penelitian yang dilakukan oleh Didik Mulya Setyawan dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SDN Magersari Kabupaten Rembang. Analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Rembang telah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan telah disalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi warga tidak mampu untuk keperluan sekolah anaknya hingga mencapai pendidikan menengah. Semua tahapan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dilaksanakan mulai dari sosialisasi, usulan, verifikasi hingga penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP). Kendala yang ditemukan seperti belum dapat tersalurkan dana ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan atau salah dalam penyaluran kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, hal ini

disebabkan karena kendala administrasi. Adapun saran dari penelitian ini diantaranya bahwa masyarakat hendaknya memaknai program ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan kepada siswa hingga jenjang menengah, sehingga tidak mengambil keuntungan dari program ini untuk kepentingan-kepentingan yang diluar keperluan sekolah, atau bahkan bagi keluarga yang tidak seharusnya menerima bantuan dari Progam Indonesia Pintar (PIP) tidak berupaya untuk mengajukan bantuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Hadiatullah dengan judul Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan variabel implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Penyuluhan hingga proses pemberian dana tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar terhadap masyarakat sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankannya. Dalam hal efektifitas pelaksana dilapangan sudah berjalan dengan baik karena pelaksana atau implementor sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada

Berikut rangkuman penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	<p>Illiya Arina Riska, Dewi Rostyaningsih</p> <p>Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus</p> <p>Journal Policy And Management Review Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif bersifat deskriptif.</p> <p>Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dengan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Komunikasi antar organisasi aktivitas pelaksana 5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 6. Kecenderungan (disposition) dari para pelaksana/implementor 	<p>Masalah implementasi Indonesia Program Pintar antara lain tujuan dan sasaran, sosialisasi, data mekanisme pengumpulan dan verifikasi, distribusi dana, komunikasi, sumber daya, karakteristik agen pelaksana dan lingkungan sosial. Itu rekomendasi yang diberikan adalah bahwa lembaga pelaksana harus lebih banyak bertanggung jawab untuk mengoordinasi sekolah menengah pertama dan bank penyalur, menjadi mampu memperhatikan sumber daya manusia yang terlibat dalam Smart Indonesia ini program menjadi lebih memadai tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas, itu agen pelaksana harus dapat bersikap tegas dan ketat terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk lingkungan sosial, terutama orang tua dari Program Indonesia Pintarpenerima manfaat, harus lebih dipahami dan mematuhi ketentuan dan program teknis Indonesia Pintar.</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian penulis namun dengan lokus yang berbeda. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian dengan indikator yang berbeda yang dapat menjadi acuan bagi penelitian penulis.</p>
2.	<p>Yoani Mega Pertiwi, Aloysius Rengga</p> <p>Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar Negeri (SD) Di Jakarta Timur Wilayah II</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Peneliti menggunakan teori George Edward III dengan variabel implementasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, 	<p>Pada kenyataannya di lapangan implementasi KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme KJP di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrumen wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus disekolah untuk</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian penulis namun dengan lokus yang berbeda. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian dengan indikator yang berbeda</p>

	Journal Policy And Management Review Volume 5, Nomer 3, Tahun 2016	4. Struktur Birokrasi.	menangani KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder.	yang dapat menjadi acuan bagi penelitian penulis.
3.	Sartika, Dian Prima Safitri, Edison Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Kota Tanjungpinang Repositori Universitas Maritim Raja Aji Haji	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teori George Edward III dengan variabel implementasi, yaitu: 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, 4. Struktur Birokrasi.	Analisis menggunakan teori Edward III yakni 1). komunikasi hanya pusat yang mensosialisasikan dan itu belum merata diketahui oleh masyarakat sementara berdasarkan juknis sosialisasi seharusnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/ kota nyata dilapangan bahwa itu tidak dilakukan, 2). Sumberdaya berupa data dan data yang digunakan merupakan data tahun 2011, 3). Disposisi atau sikap pelaksana bahwa Bappeda baru melakukan pendataan ulang guna mendapatkan data yang benar, 4) Struktur birokrasi yang jelas antara pusat dan pelaksana kota saja sementara sesama pelaksana kota kepada masyarakat belum terlihat. Implementasi program KIP di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan karena masih ada keluarga yang mampu menerima KIP sementara masih banyak keluarga yang tidak mampu namun tidak mendapatkan KIP dan manfaatnya. Saran agar kedepan pendistribusian tepat kepada yang membutuhkan dan data yang digunakan data terbaru sehingga implementasi KIP tepat kepada sasarannya.	Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian penulis namun dengan lokus yang berbeda. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian dengan indikator yang berbeda yang dapat menjadi acuan bagi penelitian penulis.
4.	Lilis Novia Saraswati Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan PIP sehingga belum sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan PIP,	Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian penulis namun dengan lokus yang berbeda. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena

	eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 4, 2017: 6737-6750 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id		diantaranya data yang digunakan dalam penentuan siswa calon penerima KIP masih kurang akurat, waktu pencairan dana PIP yang terlambat, kegiatan sosialisasi yang masih kurang optimal dilakukan, lamanya waktu verifikasi kepemilikan KIP, serta masih rendahnya kesadaran wali murid tentang peruntukkan bantuan PIP	penelitian dengan indikator yang berbeda yang dapat menjadi acuan bagi penelitian
5.	Didik Mulya Setyawan Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Di SDN Magersari Kabupaten Rembang Indonesian Journal of Development Economics Efficient Vol 1 (3) (2018): 270-281	Analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Rembang telah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan telah disalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi warga tidak mampu untuk keperluan sekolah anaknya hingga mencapai pendidikan menengah. Semua tahapan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dilaksanakan mulai dari sosialisasi, usulan, verifikasi hingga penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP). Kendala yang ditemukan seperti belum dapat tersalurkannya dana ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan atau salah dalam penyaluran kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, hal ini disebabkan karena kendala administrasi. Adapun saran dari penelitian ini diantaranya bahwa masyarakat hendaknya memaknai program ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan kepada siswa hingga jenjang menengah, sehingga tidak mengambil keuntungan dari program ini untuk kepentingan-kepentingan yang diluar keperluan sekolah, atau bahkan bagi keluarga yang tidak seharusnya menerima bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) tidak berupaya untuk mengajukan bantuan.	Penelitian ini berkaitan dengan evaluasi implementasi kebijakan program PIP sedangkan penelitian penulis merupakan implementasi kebijakan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai evaluasi dari kebijakan program PIP.

6.	<p>Rizky Hadiatullah</p> <p>Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember</p> <p>Repositori Universitas Muhammadiyah Jember</p>	<p>Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Peneliti menggunakan teori George Edward III dengan variabel implementasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi, 4. Struktur Birokrasi. 	<p>Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Penyuluhan hingga proses pemberian dana tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar terhadap masyarakat sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankannya. Dalam hal efektifitas pelaksana dilapangan sudah berjalan dengan baik karena pelaksana atau implementor sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada.</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian penulis namun dengan lokus yang berbeda. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian dengan indikator yang berbeda yang dapat menjadi acuan bagi penelitian</p>
----	---	--	--	--

Sumber: data diolah dari beberapa kebaruan penelitian yang berbeda-beda, 2020

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik atau dulu dikenal Administrasi Negara pada dasarnya adalah sebuah bentuk kerjasama administratif yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2011 :7) mengatakan bahwa Administrasi Publik merupakan proses dimana sumberdaya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan- keputusan dalam kebijakan. Candler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affair*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan- perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Jhon M.Pfiffner dan Robert V. Presthus mendefinisikan administrasi publik adalah :

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan- badan perwakilan politik.
2. Koordinasi usaha- usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan- kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik- teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. (Pasolong, 2011 : 8)

Pandangan lain dikemukakan oleh Nicholas Henry dalam Pasolong (2011 :8) yang mendefinisikan administrasi publik adalah :suatu kombinasi yang kompleks antar teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik- praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.”

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik suatu kegiatan yang dilakukan melalui usaha kerjasama dua orang atau lebih dalam melaksanakan tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif agar mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik terus berkembang dan berevolusi mengikuti irama perkembangan masyarakat. Dinamika dan tuntutan sebagai tanggung jawab dari sebuah ilmu maka arus pengetahuan administrasi publik terus berputar mengikuti tuntutan sekaligus memberikan solusi nyata akan persoalan administrasi publik yang mengatur dan memenuhi kebaikan bersama. Dimulai dari *the old public administration* sampai *new public service* yang menjadikan ilmu administrasi publik memantapkan diri sebagai disiplin ilmu yang mandiri sehingga

membutuhkan kajian yang sangat mendalam untuk memahami ilmu administrasi publik.

The old administration sebagaimana yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson (1887) dalam Thoha (2010: 72) yang mengatakan bahwa “*administration lies outside proper sphere of politics. administration question are not political question. although politics sets the tasks for administration, it should not be suffered to manipulate its offices*”.

Wilson juga telah mengingatkan bahwa kontelasi pelaksanaan sebagai domain administrasi negara seperti itu ada bahayanya yakni bisa besar kemungkinan diintervensi oleh politik, terutama politisi yang korup (*corrupt politicians*) yang berpengaruh *negative* terhadap administrator dalam melaksanakan kebijakan dengan efisien.

Paradigma NPM atau *reinventing government* seperti yang di sampaikan oleh D. Osborne dan T. Gaebler (1992) dalam Keban (2008: 36) ini melihat bahwa paradigma terdahulu yaitu administrasi klasik kurang efektif dalam memecahkan masalah, termasuk membangun masyarakat. NPM dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern (Vigoda dalam Keban, 2008: 36). Konsep seperti inilah maka Christopher Hood dari London School of Economics (1995) dalam Thoha (2010: 75) mengatakan bahwa NPM mengubah cara- cara dan

model birokrasi publik yang tradisional ke arah caracara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar.

Tahun 2003 atau kurang lebih sepuluh tahun muncul lagi paradigma baru oleh J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt (2003) yang diberi nama *New Public Service* (NPS). Kedua tokoh ini menyarankan untuk meninggalkan prinsip prinsip administrasi klasik dan *reinventing government* / NPM dan beralih ke NPS. Menurut Denhardt dan Denhardt (2003) dalam Keban (2008: 37) administrasi publik harus :

1. Melayani warga masyarakat bukan pelanggan (*serve citizen, not customers*)
2. Mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*)
3. Lebih menghargai kewarganegaraan dari pada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*)
4. Berpikir strategiss, dan bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*)
5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (*recognize that accountability is not simple*)
6. Melayani daripada mengendalikan (*serve rather than steer*)
7. Meghargai orang bukannya produktivitas semata (*value people. Not just productivity*)

Berkembangnya tuntutan dari masyarakat saat ini memunculkan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadikan masyarakat sebagai pusat pelayanan (*New Public Service*). Hal ini megakibatkan terjadinya pergeseran paradigma ilmu administrasi

publik. Pergeseran paradigma membuat para ahli memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai administrasi publik secara berbeda- beda sehingga berkembanglah berbagai macam paradigma mengenai administrasi publik. Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2011: 28-30), mengemukakan 5 paradigma administrasi publik yaitu:

Paradigma *pertama*, prinsip- prinsip administrasi negara (1927-1937) lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini, yang penting fokusnya yaitu “prinsip-prinsip administrasi” dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

Paradigma *kedua*, paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926), fokus dari ilmu administrasi negara terbatas pada masalah- masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara ini berada. Pada masa ini dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara.

Paradigma *ketiga*, administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970). Pada masa ini secara singkat dijelaskan bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Fase ini ada dua perkembangan baru yang patut dicatat, yaitu (1) tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis, (2)

timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi.

Paradigma *keempat*, administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1954- 1970). Pada masa ini administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak pada lokusnya.

Paradigma *kelima*, administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Masa ini terjadi setelah tahun 1970. Pada masa ini administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*) dan ekonomi politik. Di dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri.

Dalam kaitannya dengan paradigma Administrasi Publik, penelitian ini mengacu pada paradigma 5 yang berlangsung sejak 1970 hingga sekarang, yaitu paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara karena fokus dari administrasi ini terkait dengan kebijakan publik yang meliputi kebijakan penyelenggaraan bantuan pendidikan siswa miskin, sedangkan lokusnya adalah wilayah pemerintahan tingkat kecamatan.

Ilmu administrasi publik saat ini sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri dan dalam perkembangannya ilmu administrasi publik menjadi wadah bagi ilmu lain yang berada di bawahnya. Salah satu yang menjadi bagian dari ilmu administrasi publik adalah kebijakan publik. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Nicholas Henry yang terdapat pada paradigma kelima menyatakan bahwa administrasi negara telah

berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), dan ekonomi politik. Dengan begitu kebijakan publik sebagai ilmu yang masuk dalam wilayah kajian dari ilmu administrasi publik.

1.5.4 Kebijakan Publik

Sementara itu, pengertian kebijakan atau *policy* hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sebagaimana telah diuraikan pada bab awal tulisan ini, bahwa *publik* adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya.

Secara umum, istilah “kebjakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Budi Winarno, 2007:16). Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna

bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah bukan swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (Dye dalam Subarsono, 2012: 2).

Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008 :9) yaitu kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan- peraturan perundang- undangan atau dala policy statement yang berbentuk pidato-pidato wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Sedangkan James E. Anderson dalam Subarsono (2010: 2) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/ dibuat oleh badan- badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah (dalam Winarno, 2007: 20-21):

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Bahwa kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Harold D. Laswell (Laswell dalam Suwitri, 2009: 10), kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah.

Richard Rose mendefinisikan kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi- konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri” (Rose dalam Winarno, 2012: 20).

Sedangkan Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan” (dalam Winarno 2005:102).

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh ahli di atas ada makna yang terkandung dalam pengertian kebijakan publik (Suwitri, 2009: 6), yaitu:

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu itu adalah suatu tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*);
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian

tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan 24 dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek;

3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan. Perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan dalam ilmu kebijakan disebut sebagai aktor kebijakan;
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

Penulis simpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala macam tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicarikan alternatif pemecahan dari persoalan tersebut dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki negara.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dianggapnya sangat mendesak untuk segera diatasi. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Kebijakan tersebut dibuat untuk mengantisipasi menurunnya tingkat partisipasi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk bersekolah dan menjadikan kel keluarga miskin tetap dapat menyekolahkan anaknya dan terhindar dari putus sekolah.

1.5.5 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hasil dari rangkaian tahapan proses kegiatan. Tahapan- tahapan proses kegiatan tersebut merupakan ruang

lingkup dari kajian kebijakan publik.

Terdapat beberapa pandangan dari para tokoh mengenai proses kebijakan publik. Islamy dalam Suwitri (2008:69) Kebijakan publik dalam suatu proses akan diawali dengan perumusan kebijakan sebelum dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi. Pandangan lain mengenai proses kebijakan publik dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Menurut Thomas R. Dye (dalam Widodo, 2009: 16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

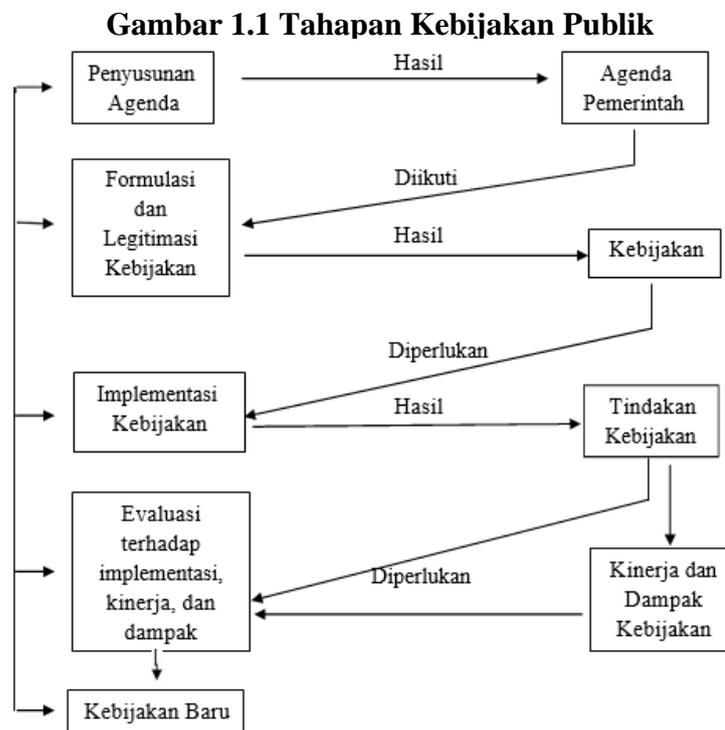
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksklusif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Sebuah kebijakan siap dijalankan oleh administrator harus melalui beberapa langkah. Langkah yang harus di lewati dalam merumuskan sebuah kebijakan itu terdiri dari suatu deretan tindakan yang didalamnya memiliki suatu proses bersifat politis. Kegiatan bersifat politis tersebut nampak dalam deretan kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Di dalam pandangan Ripley (dalam Subarsono 2012: 11-12), tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Ripley (dalam Subarsono 2012: 11-12)

Menurut Ripley (dalam Subarsono, 2012: 11-12), ada beberapa tahapan yang dilalui dalam membuat suatu kebijakan, yaitu:

1. Penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang dilakukan; yakni
 - a. Membangun persepsi dikalangan stakeholder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah;
 - b. Membuat batasan masalah; dan
 - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
2. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan. Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
3. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Di dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

4. Tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan.
5. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Proses kebijakan publik yang akan diuraikan dalam penelitian ini yaitu pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang paling penting dalam kebijakan publik. Proses implementasi yang dilaksanakan oleh seorang administrator dapat ditafsirkan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai tujuan dari kebijakan tersebut dan membawa dampak kepada kelompok sasaran atau belum. Penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

1.5.6 Implementasi Kebijakan

1.5.6.1. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat ditafsirkan secara luas sebagai deretan langkah dari proses kebijakan setelah dilakukan kegiatan formulasi kebijakan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai arti dari pelaksanaan keputusan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan mekanisme kerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi sebuah langkah yang paling

urgent dari sebuah kebijakan. Suatu kebijakan hanya menjadi rencana bagus apabila tidak dijalankan dan akan tersimpan rapi di dalam lemari arsip. Tujuan yang telah dibuat akan menjadi impian belaka saja.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (dalam Winarno, 2007: 145). Proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa pendekatan dari kebijakan yang dilaksanakan. Menurut Lester dan Stewart (2000) dalam Agustino (2008: 140) ada beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yaitu *the command and control approach* (pendekatan *top-down*) dan *the market approach* (pendekatan *bottom-up*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Pendekatan tersebut juga terdapat berbagai macam model yang dikemukakan oleh para ahli untuk melihat implementasi suatu kebijakan. Pendekatan *top-down* dapat menggunakan model dari *top-down* dari beberapa ahli seperti, George C. Edward III, Van Meter Van Horn, Googgin, dan lain-lain. Pendekatan *down-up* dapat menggunakan model *down-up* dari Elmore.

1.5.6.2. Model Implementasi

Implementasi kebijakan publik memiliki model-model sebagaimana telah dijelaskan menurut para ahli. Beberapa model implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

1) Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan realistis dengan kondisi sosio kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan dan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. dalam implementasi kebijakan diperlukan. Hal ini baik mencakup sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

c. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini diasumsikan apabila koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat baik, maka kesalahan akan sangat kecil terjadi

d. Karakteristik Agen Pelaksana.

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini

mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

e. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Hal ini mencakup sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana.

Hal ini mencakup respon implementor terhadap kebijakan yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi atau pemahaman terhadap kebijakan; dan intensitas disposisi implementor atau preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2) Model George C. Edwards III

Edward III (dalam Winarno, 2014) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya, Edward III menjelaskan terdapat empat variabel yang mendukung dan menghambat dalam suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program atau kebijakan dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran terhadap kebijakan atau program, maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program atau kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel:

- a. Transmisi

Yakni penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Dalam penyaluran komunikasi tidak jarang terjadi kesalahpahaman (*miskomunikasi*) yang

disebabkan karena komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi.

b. Kejelasan

Yakni komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas, mudah dimengerti dan tidak membingungkan agar mudah melakukan tindakan.

c. Konsistensi

Yakni pemberian perintah dalam pelaksanaan suatu komunikasi yang bersifat konsisten dan jelas (untuk ditetapkan dan dijalankan). Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan telah memiliki unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana dalam menjalankan kebijaksanaan dengan baik.

2. Sumber daya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya apabila dirinci lebih lanjut meliputi:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu (1) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yaitu, pertama badan-badan birokrasi pemerintah bersifat homogen. Tingkah laku yang homogen berkembang karena model rekrutmen staf baru yang berlangsung secara selektif. Selanjutnya, aspek lain yang merupakan sifat badan pemerintah adalah berkembangnya pandangan-pandangan parokial

yang disebabkan karena terlalu sedikitnya jumlah pembuat keputusan tingkat tinggi yang menghabiskan masa jabatannya suatu badan atau departemen serta pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Terdapat dua karakteristik yang mendukung dan menghambat pada kinerja struktur birokrasi, yaitu:

a. Mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program atau kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

- b. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

3) Model Merilee S. Grindle (1980)

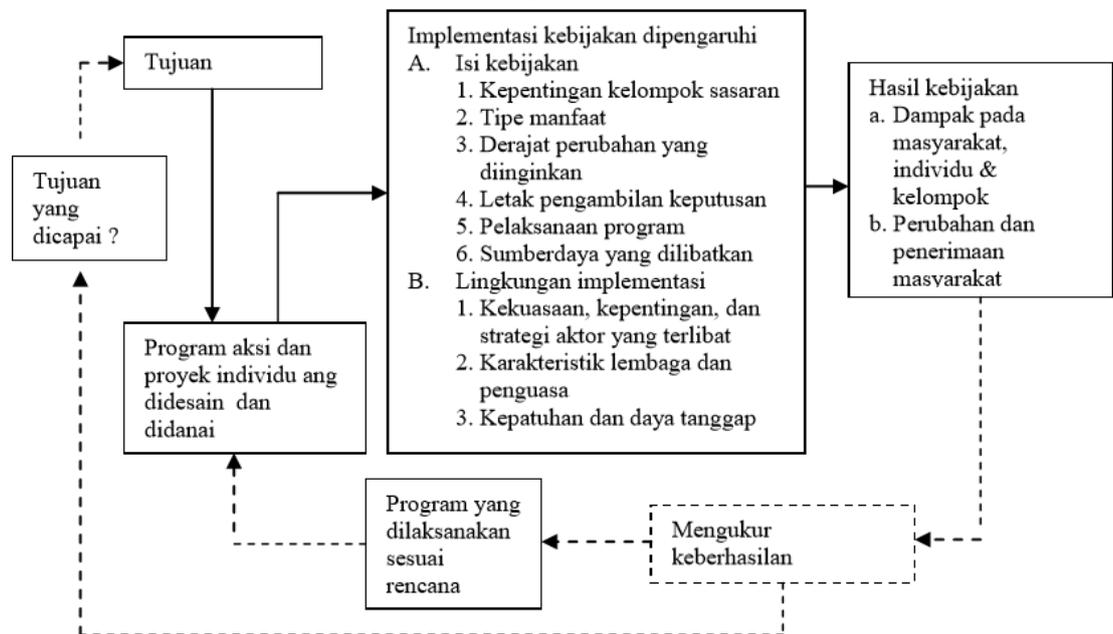
Keberhasilan implementasi publik menurut Marilee S. Grindle (1980) dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin di raih). Selain itu keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan impelentasi (*context implementation*). Variabel isi kebijakan (*content of policy*) ini mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran
- c. Sejauh mana derajat perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan, variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
- Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Gambar 1.2 Teori Implementasi Menurut Grindle



Sumber: Grindle dalam Subarsono (2005:93)

Pada prinsipnya untuk menilai suatu kebijakan diimplementasikan dengan baik dengan melihat keefektifan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Keefektifan Pelaksanaan Kebijakan, Riant Nugroho (2014)

Menurut Riant Nugroho (2014: 686) mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui “Lima Tepat”, yaitu:

Pertama ketepatan kebijakan yang dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Kedua, ketepatan pelaksanaan berkaitan dengan aktor implementasi kebijakan, seperti diketahui bahwa aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah melainkan ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah kerjasama antar pemerintah, masyarakat/swasta, atau kebijakan yang diswastakan (*privatization or contracting out*). Masing-masing aktor berperan sesuai dengan jenis kebijakan dan tingkat urgensi aktor tersebut dalam suatu kebijakan.

Ketiga, ketepatan target yaitu berkenaan dengan tiga hal, pertama, “apakah target yang akan diintervensi sesuai dengan yang direncanakan”, “Apakah tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain.” Kedua, “apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi?”. Ketiga, “apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya”.

Keempat, ketepatan lingkungan. Terdapat dua lingkungan yang menentukan implementasi kebijakan yaitu lingkungan kebijakan yang artinya interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Lingkungan kebijakan yang

pertama ini disebut oleh Calista (1994) dalam Riant Nugroho (2014: 687) sebagai variabel endogen yang terdiri atas *authoritative arrangement* berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan kedua oleh Calista dalam Riant Nugroho (2014: 688) disebut variabel eksogen yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretative institution* berkenaan dengan interpretasi lembaga- lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dan individualis yaitu individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menilai kebijakan dan implementasi kebijakan.

Kelima adalah ketepatan proses, secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses dalam Nugroho (2014 : 688), yaitu

1. *Policy acceptance* artinya publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disini pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

2. *Policy adaption* artinya publik memahami kebijakan sebagai sebuah ‘aturan main’ yang diperlukan untuk masa depan, disini pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
3. *Policy readiness* artinya publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disini birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

“Lima tepat” dari Riant Nugroho dapat dijadikan indikator penulis *untuk* menafsirkan keefektifan suatu kebijakan. Apakah implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar sudah tepat dengan “lima tepat” yang dikemukakan oleh Riant Nugroho sesuai dengan yang diharapkan kelompok sasaran atau belum. Dengan begitu penulis dapat mengetahui berbagai problem yang dihadapi dalam implementasi sebuah kebijakan.

Memilih model implementasi yang sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan itu dapat memudahkan kita menganalisis faktor- faktor yang terjadi saat proses implementasi. Selain faktor implementasi yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan yang efektif itu seperti apa dan melihat apakah pelaksanaan suatu kebijakan tersebut sudah berhasil dan membawa dampak kepada kelompok sasaran perlu ditentukan indikator dalam pencapaian pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut.

Dengan begitu guna memudahkan penulis di dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan sebuah pendekatan campuran dengan menggunakan model dari Riant Nugroho. Penggunaan

pendekatan ‘Lima Tepat’ menurut penulis sangat tepat dikarenakan kebijakan Program Indonesia Pintar ini sebagai bentuk sikap pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat akan kegelisahan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada bidang perekonomian. Pendekatan campuran dari model Riant Nugroho menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini, apakah Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Tembalang membawa dampak kepada keluarga miskin dan sudah mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.5.7 Program Indonesia Pintar (PIP)

a. Pengertian Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat

pendidikan menengah dan mencegah atau menarik peserta didik putus sekolah.

b. Sasaran Program

Indonesia Pintar Penerima Program Indonesia Pintar diprioritaskan kepada anak yang berusia 6 sampai 21 tahun. Persyaratan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada pendidikan formal adalah peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik Sekolah dan diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis Kemendikbud.

c. Pemanfaatan dana PIP dan Larangan Dana PIP

Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa untuk pemanfaatan sebagai berikut:

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
3. Transportasi siswa ke sekolah
4. Uang saku siswa ke sekolah
5. Biaya kursus/les tambahan.

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, antara lain: judi, narkoba, miras dan tindakan negatif lainnya. Setelah menerima dana Program Indonesia Pintar peserta didik mempunyai kewajiban kewajiban menggunakan dana Program Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana, terus bersekolah dengan rajin dan tekun, disiplin melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan berkepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela.

d. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Adapun mekanisme penentuan PIP dan penyalurannya sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat teknis menentukan dan menginformasikan kuota calon penerima Program Indonesia Pintar ke dinas pendidikan kabupaten/ kota, kemudian
2. Dinas pendidikan kabupaten/ kota menginformasikan dan mendistribusikan kouta ke sekolah- sekolah dengan mempertimbangkan :
 - a) Kondisi masyarakat miskin
 - b) Jumlah siswa miskin di sekolah
 - c) Prinsip pemerataan
 - d) Prinsip keadilan
3. Sekolah membuat daftar usulan calon penerima PIP berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.

4. Kemudian daftar usulan diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten/ kota untuk dibuat daftar gabungan semua data usulan calon penerima PIP masing- masing jenjang. Kemudian dilakukan penyesuaian terhadap kouta PIP yang diberikan direktorat teknis kementerian pendidikan dan kebudayaan berdasarkan skala prioritas. Apabila terdapat siswa penerima kartu calon penerima PIP yang belum termasuk dalam usulan karena melebihi kouta dapat diusulkan tahun berikutnya
5. Kepala dinas pendidikan kabupaten/ kota membuat surat keputusan (SK) penetapan siswa calon penerima PIP untuk masing- masing jenjang dan surat pengajuan calon penerima PIP. SK beserta lampirannya diajukan dan dikirim ke masing- masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Mekanisme penyaluran dana PIP sebagai berikut:

1. Peran Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pencairan PIP

Pencairan dana PIP dilakukan oleh masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan, Sekretariat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Sekertariat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima PIP dari masing-masing direktorat teknis yang dilampiri:

- a) Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima PIP.
 - b) Surat perjanjian kerja sama antara Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan lembaga penyalur
 - c) Kuitansi Penyerahan Dana PIP dari Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Lembaga Penyalur
2. Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut Bagian Keuangan Sekretariat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Sekretariat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat permintaan membayar Surat Permintaan Membayar (SPM).
 3. Surat permintaan membayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana dicairkan oleh KPPN langsung ke Lembaga penyalur melalui rekening atas nama Direktur atau kepala lembaga penyalur.

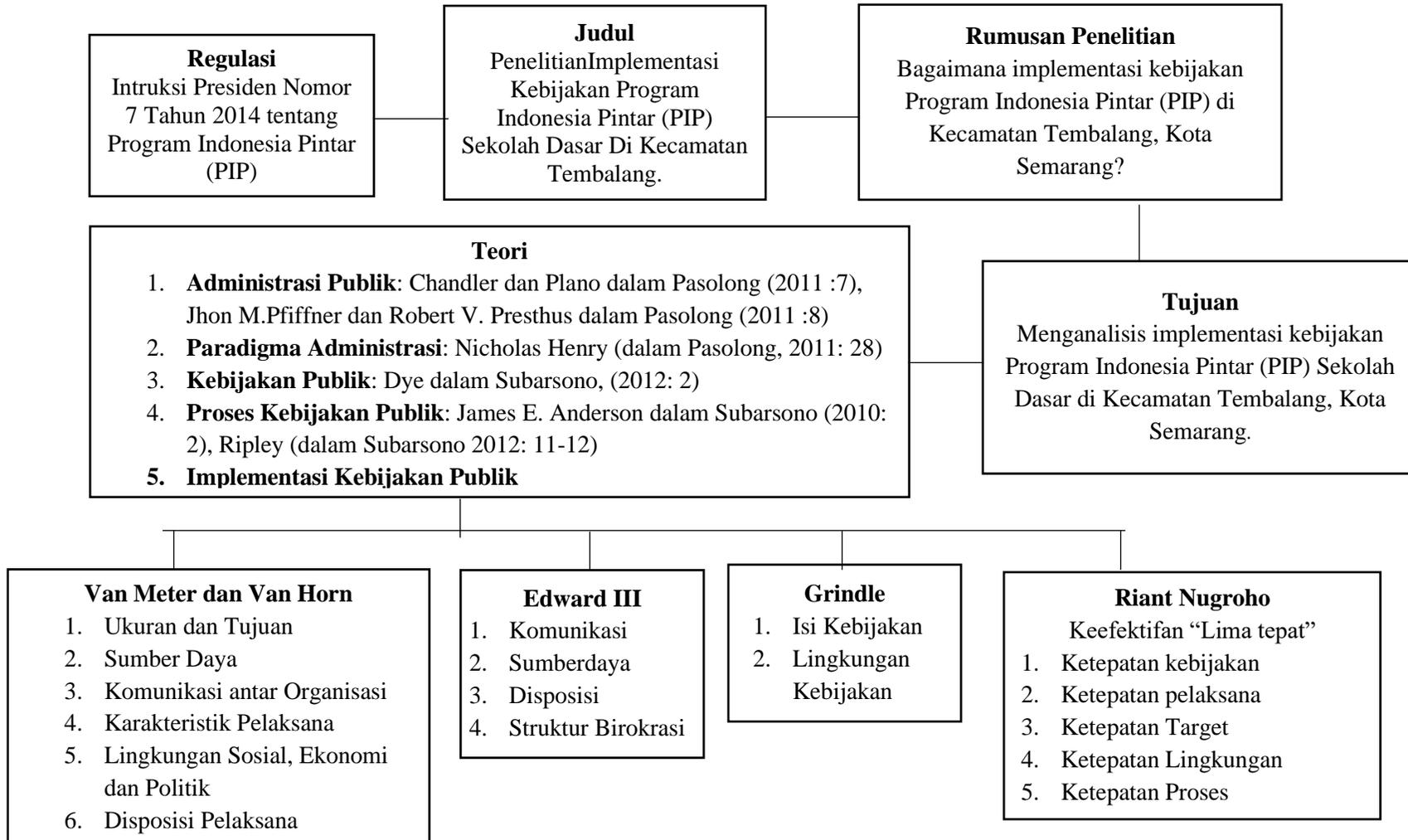
Pengambilan dana PIP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana PIP diambil langsung oleh siswa penerima bantuan dengan syarat:
 - a) Menunjukkan salah satu dari tanda pengenal siswa diantaranya :
kartu calon penerima PIP; kartu pelajar; fotokopi raport lembar pertama yang berisi data siswa dan lembar daftar nilai terakhir, atau; surat keterangan dari sekolah yang menerangkan siswa yang bersangkutan benar sekolah di masing-masing jenjang tersebut.

- b) Menandatangani bukti penerimaan dana PIP yang disediakan oleh lembaga penyalur
2. Pengambilan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah/orang tua/wali apabila siswa mengalami kesulitan mengambil dana secara langsung seperti pada point (1) dengan syarat:
- a) Lokasi sekolah sangat jauh, terpencil, dan terisolir secara geografis;
 - b) Lokasi sekolah terisolir karena bencana alam;
 - c) Batas waktu pengambilan PIP, siswa penerima PIP kondisinya tidak memungkinkan mengambil sendiri karena sakit
 - d) Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima PIP yang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan;
 - e) Kepala sekolah/orang tua/wali penerima kuasa harus segera menyerahkan dana Program Indonesia Pintar (PIP tersebut kepada siswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah PIP diterima oleh Kepala Sekolah/orang tua/wali). Siswa menandatangani kembali daftar penerimaan PIP sebagai bukti penerimaan untuk Kepala Sekolah/orang tua/wali.
3. Penggantian siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dilakukan apabila:
- a) penerima bantuansiswa miskin (PIP)keluar dari sekolah;
 - b) penerima bantuansiswa miskin (PIP) pindah sekolah; dan
 - c) penerima bantuansiswa miskin (PIP) meninggal dunia.

Kondisi tersebut menyebabkan dana bantuan tidak dapat dicairkan, maka sekolah dapat mengusulkan nama pengganti melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diteruskan ke masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa mengubah kuota yang ada. masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan SK pergantian nama tersebut dan selanjutnya menyerahkan ke lembaga penyalur untuk diteruskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan Dana PIP tersebut diterima oleh siswa.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian merupakan objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang akan diteliti. Fenomena penelitian digunakan agar mempermudah peneliti dalam alur pikir dan penyesuaian teori yang telah dipaparkan oleh peneliti, adapun fenomena dan indikasi yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan

Ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang telah di buat memuat hal- hal yang memang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada. Indikator dari ketepatan ini dinilai dari:

- a. Kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- b. Kebijakan bermuatan hal- hal yang dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan.
- c. Kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Aktor dalam implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah melainkan terdapat lembaga lain yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah kerjasama antar pemerintah, masyarakat/ swasta, dan kebijakan yang diswastakan (privatization or contracting out). Masing- masing aktor

berperan sesuai dengan jenis kebijakan dan tingkat urgensi aktor dalam kebijakan. Indikator dalam ketepatan pelaksana ini dinilai dari:

- a. Ketepatan aktor pelaksana kebijakan
- b. Ketepatan tugas pelaksana kebijakan

3. Ketepatan target

Ketepatan target adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari target kebijakan. Indikator dalam ketepatan ini dinilai dari:

- a. Ketepatan target penerima
- b. Target dalam kondisi siap untuk di intervensi
- c. Intervensi target dalam implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan adalah kebijakan yang telah dibuat telah sesuai dengan lingkungan kebijakan, seperti interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.

Indikator dalam ketepatan ini dinilai dari:

- a. keterkaitan lembaga- lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lainnya
- b. Persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan
- c. Sumber otoritas kebijakan

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan proses di dalam implementasi kebijakan public sehingga pelaksana kebijakan

memahami tugas dan kelompok sasaran menerima dari kebijakan tersebut.

Indikator dalam ketepatan ini dinilai dari:

- a. Kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan
- b. Kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan

1.8 Metode Penelitian

Bogdan dan Taylor (1975) dalam Deddy Mulyana (2003: 145) metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.

1.8.1 Desain Penelitian

Desain penelitian digunakan untuk mengetahui rancang bangun yang akan di buat di dalam penelitian ini agar penelitian berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu disusun secara cermat. Terdapat dua metode dalam melakukan penelitian yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. David Williams (1995) dalam Moleong (2010: 5) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Metode kuantitatif (dalam Sugiyono, 2009: 7) merupakan data penelitian berupa angka- angka dan analisis menggunakan statistik.

Metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif terdapat tiga macam jenis penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1995: 4-5) penelitian dikelompokkan menjadi tiga tipe yaitu:

1. Penelitian eksplanatori, penelitian ini bertujuan menguji hipotesis tentang besar kecilnya hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti, dalam rangka untuk menguji hipotesis yang dirumuskan guna mendapatkan kesimpulan apakah hipotesis itu di terima atau ditolak.
2. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan memperdala, menelusuri atau menggali tentang gejala tertentu dengan maksud merumuskan masalah secara lebih terperinci serta menjelaskan hubungan kausal antara variable-variable melalui pengujian hipotesis.
3. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, atau menggambarkan mekanisme sebuah proses/hubungan.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul adalah bentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Apabila terdapat angka- angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan objek dan subjek pengamatan. Data yang diperoleh meliputi wawancara, studi pustaka dan dokumen.

1.8.2 Situs Penelitian

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dengan aktor- aktor kebijakannya yang dapat berupa pemerintah dan *stakeholder* atau pihak yang terkena dampak atas berlakunya suatu kebijakan. Di dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Jadi peneliti mengambil lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Tembalang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2009: 223) dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu- satunya yang dapat mencapainya.

Manusia diartikan sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2010:132). Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive*, artinya pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (dalam

Sugiyono, 2009: 218). Cara ini dilakukan karena informan yang dipilih sebelumnya, sudah penulis tentukan, dan informan juga benar-benar mengetahui langsung dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa subjek yang dijadikan sebagai informan, yaitu Pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang yang menangani PIP, UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik, dan Sekolah Dasar di Tembalang.

Selain itu peneliti dalam memperoleh data kualitatif tidak peneliti menggunakan teknik *snowballing*. *Snowballing* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar (dalam Sugiyono, 2009: 219). Artinya dimana pertama peneliti menentukan satu orang sebagai *key* informan dan dari *key* informan ini akan berkembang sesuai petunjuknya, kemudian selanjutnya orang tersebut yang akan menunjuk orang lain untuk kita jadikan informan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang cukup lengkap dari berbagai sumber data. Subjek penelitian yang dimaksud peneliti di sini adalah orang tua murid penerima PIP.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2010: 157-163) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber tertulis, kata-kata dan tindakan, foto dan data statistik.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Syaifuddin Azwar (2013: 91) apabila dilihat dari sumbernya maka data kualitatif dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan atau alat pengukuran data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen dan hasil wawancara langsung dengan informan terkait Program Indonesia Pintar (PIP).

Informan	Nama	Selaku
Informan 1	Bapak Taufik	Kepala Bagian Bidang Monitoring Dan Pengembangan Di Dinas Pendidikan Kota Semarang
Informan 2	Bapak Dwiyanto	Kepala UPTD Kecamatan Tembalang
Informan 3	Bapak Suwito	Kepala Sekolah Sd Bulusan, Kecamatan Tembalang
Informan 4	Bapak Ngadikan	Kepala Sekolah Sd Mangunharjo, Kecamatan Tembalang
Informan 5	Bapak Rasdi	Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang
Informan 6	Ibu Nur Asiyah	Wali Murid Penerima Manfaat PIP

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dilihat

dari sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Terkait dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel-artikel di media cetak seperti koran, surat kabar online dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Moleong (2017:125) observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan.

2. Wawancara/Interview

Menurut Sugiyono (2017:188), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dan bertatap muka secara langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang,

UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang, Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang, dan perwakilan orang tua murdi penerima PIP.

3. Metode Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2017:188), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen ini akan peneliti gunakan sebagai alat penguat data yang diperoleh dari narasumber/ informan berupa foto atau hal-hal lain seperti tulisan yang terkait dengan dokumentasi dan berisi tentang beberapa kegiatan yang dilakukan.

4. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, menganalisis, dan membuat catatan dari buku yang di perlukan, seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2010: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengoperasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

a. *Data reduction* (reduksi data)

Diartikan sebagai merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting sesuai dengan fokus penelitian terkait masalah Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar.

b. *Data display* (penyajian data)

Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dan lain- lain. Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text* (dalam Sugiyono, 2009: 249). Penelitian ini lebih menekankan pada bentuk penyajian yang bersifat deskriptif/ naratif.

c. *Conclusion drawing/ Verification*

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap setelah diteliti menjadi jelas.

1.8.8 Kualitas Data

Sebuah penelitian sangat penting untuk mengetahui kualitas dari data yang diperoleh dari lapangan guna mengetahui kualitas

sebuah data biasanya sering disebut sebagai uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Artinya data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi dalam melakukan uji validitas untuk mengetahui kualitas data yang diperoleh. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2009:273) *Triangulation is qualitative cross- validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources of multiple data collection procedures.* Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dengan demikian terdapat berbagai teknik pengujian dengan menggunakan triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan mengecek derajat kepercayaan sumber dari hasil informan yang berbeda karena untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dibutuhkan informan yang beragam.